

Apa Kabar Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia?



Peneliti Habibie Center Muhammad Arif (kedua dari kanan) memaparkan tentang poros maritim dunia di Seminar Nasional bertajuk Prospek Poros Maritim Dunia di Periode Kedua Jokowi di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat

Indonesia sebagai poros maritim dunia telah dicanangkan pada tahun 2014 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), atau tahun pertama Jokowi menjabat sebagai Presiden RI. Namun, seiring dengan jabatan Presiden periode

pertama yang akan berakhir Oktober mendatang, realisasi konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia seolah luput dari pengawasan. Ditambah lagi, pada masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 April lalu, persoalan poros maritim ini sama sekali tak disinggung. Demikian pula dalam pidato kemenangan Jokowi di Sentul, Bogor pada 14 Juli. Cita-cita menjadikan Indonesia poros maritim dunia tak disinggung sama sekali. Lantas, apa kabar program menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia? Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh The Habibie Center, Indonesia sebagai poros maritim dunia yang dicanangkan lima tahun lalu itu baru menyumbang 7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Tanah Air. "Poros maritim terhadap PDB Indonesia baru 7 persen dari Rp 14.300 triliun. Padahal potensi ekonomi dari maritim kita dari semua ikan, udang dan lainnya jauh lebih besar dari itu," ujar Ketua Yayasan Dewan Pimpinan Habibie Center Sofian Effendi dalam pembukaan Seminar Nasional bertajuk 'Prospek Poros Maritim Dunia di Periode Kedua Jokowi', di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019). Acara ini diselenggarakan The Habibie Center. Ia mengatakan, dalam bidang perikanan, sedianya sudah ada perusahaan perikanan yang sukses. Namun, menurut dia, sumbangannya juga masih sedikit sekali. Sofian menyebut, baru 7 persen yang bisa dieksploitasi dari kekayaan laut Indonesia. "Kalau mau ekonomi kita tinggi, supaya problem PDB kita naik, kita harus lebih keras untuk eksploit keadaan laut ini," ujar dia. Setidaknya, kata dia, peningkatan sumbangsih poros maritim ini bisa mencapai 30 persen atau sekitar Rp 4.300 triliun per tahun.